



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si.

Jabatan : Bupati Bone

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Watampone, 20 Maret 2017

BUPATI BONE

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BONE TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata					
1.	Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata	1) Cakupan Puskesmas dan Pustu per 20.000 penduduk	per 20.000 penduduk	1	1
2.	Tersebarinya tenaga medis terlatih dan responsif gender	2) Rasio Dokter per satuan penduduk	Rasio 1/10.000	1	1
		3) Rasio tenaga medis	Rasio 1/10.000	1	1
3.	Terjalinnnya Hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan	4) Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda	Persen	100	100
4.	Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan marginal	5) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100
5.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat	6) Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	45	50
6.	Berkurangnya angka kematian ibu, bayi dan balita	7) Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	12	7,42
		8) Angka Kematian Balita	/1000 KH	8,4	3,45
		9) Angka Kematian Bayi	/1000 KH	7,6	3,01
7.	Berkurangnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit	10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : AFP Rate/10.000 Penduduk usia < 15 tahun	/10.000	4	4
		11) Persentase penemuan penderita Pneumonia balita	Persen	27,99	27,99
		12) Persentase penemuan pasien baru TB BTA +	Persen	58	58

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
		13) Persentase penderita DBD yang ditangani	Persen	100	100
		14) IR HIV/AIDS / 100.000 penduduk	Persen	100	100
		15) Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyedilkan Epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100
8.	Meningkatnya status gizi masyarakat	16) Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	< 0,05	< 0,01
9.	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi	17) Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	72,59	88
10.	Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	18) Rasio Akseptor KB aktif	Persen	72,59	65
11.	Meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi	19) Cakupan tenaga terlatih aktif PIK KRR	orang	52	52
Misi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri					
12.	Meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang makin setara dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	20) APK			
		▪ PAUD (0 - 6 tahun)	Persen	84,90	84,9
		▪ SD/MI	Persen	105,45	105,45
		▪ SMP/MTs	Persen	97,95	97,95
		▪ SMA/MA/SMK	Persen	80,70	80,7
		21) APM			
		▪ SD/MI	Persen	99,85	99,85
		▪ SMP/MTs	Persen	91,06	91,06
		▪ SMA/MA/SMK	Persen	74,85	74,85
		22) APS			
▪ SD/MI	Persen	0,1	0,1		
▪ SMP/MTs	Persen	0,11	0,11		
▪ SMA/MA/SMK	Persen	0,014	0,014		
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke	23) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	Unit	10	458

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
	perpustakaan	24) Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun	orang	9.000	9000
		25) Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	17.234	15.293
14.	Meningkatnya prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta jiwa kewirausahaan pemuda	26) Persentase cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional	Persen	100 (8 Cabang Olahraga)	100
Misi 3 : Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan					
15.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	27) Pertumbuhan ekonomi	Persen	8,74	8,99
		28) Laju inflasi	Persen	8,82	9,41
		29) PDRB konstan Th. 2000	Juta	17.690.143	18.695.613
		30) PDRB berlaku	Juta	26.888.163	29.341.171
		31) PDRB per kapita	ADHB	36.004.277	39.191.070
		32) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persen	8,94	8,26
		33) IPM	Persen	64,07	64,76
		34) Angka usia harapan hidup	Persen	72,5	72,5
		35) Angka rata-rata lama sekolah	Persen	7,88	8,08
		36) IPG	Persen	66,36	67,28
		37) IDG	Persen	80,47	83,11
16.	Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional	38) Persentase peningkatan jumlah investor berskala nasional	Persen	50	60
17.	Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	39) Angkatan Kerja yang terserap	Orang	2.550	2.700
				- Akal 1.500	1.550
				- TKI 300	350
				- Penempatan di Perusahaan 750	800
		40) Jumlah tenaga kerja kepesertaan jamsostek	Orang	2.000	2.500

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
18.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata daerah	41) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen		10,01
		42) Jumlah kunjungan wisatawan manca negara	600	600	100
		43) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	250.000	250.000	100
19.	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkembang dan bertambahnya jumlah wirausahawan baru	44) Pertumbuhan omzet UMKM (Milyar)	Milyar	990	990
20.	Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat	45) Persentase Koperasi Aktif dan sehat	Persen	51,13	51,13
21.	Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang dan menyerap tenaga kerja	46) Jumlah Unit Usaha IKM yang aktif	Unit	4.979	4.979
22.	Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	47) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	10,79	11,54
23.	Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/ perkebunan	Produksi Hasil-Hasil Pertanian:			
		48) Kontribusi Sektor Pertanian Khususnya Tanama Pangan, Holtikultura dan Perkebunan terhadap PDRB			
		49) Produktivitas Padi	Persen	58,73	58,85
		50) Produktivitas Jagung	Persen	51,99	52,09
		51) Produktivitas Kedelai	Persen	18,45	18,47
		52) Produktivitas Kacang Tanah	Persen	17,08	17,09
		53) Produktivitas Kacang Hijau	Persen	13,71	13,73
		54) Produktivitas Ubi Kayu	Persen	100,07	100,27

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
		55) Produktivitas Ubi Jalar	Persen	83,59	83,84
		56) Produksi Kakao	Ton	9.761	9.810
		57) Produksi Kelapa	Ton	13.423	13.463
		58) Produksi Tebu	Ton	29.122	29.268
		59) Produksi Kapas	Ton	413.864	415.934
		60) Produksi Kemiri	Ton	12.198	12.259
		61) Produksi Cengkeh	Ton	1.624	1.632
24.	Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya	62) Kontribusi sektor pertanian khususnya bidang peternakan terhadap PDRB			
		Produksi Ternak :			
		63) Jumlah populasi sapi	Ekor	407.006	431.426
		64) Jumlah populasi kambing	Ekor	35.240	38.763
		65) Jumlah populasi itik	Ekor	297.803	327.583
		66) Jumlah populasi ayam buras	Ekor	4.947.108	5.441.819
		67) Jumlah populasi ayam petelur	Ekor	221.623	244.183
		68) Jumlah populasi ayam pedaging	Ekor	219.550	241.505
25.	Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan	69) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB			
		70) Produksi perikanan tangkap	Ton	81.638,1	81.624,12
		71) Produksi perikanan budidaya	Ton	146.061	150.559
26.	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman	72) Persentase ketersediaan pangan utama (energi dan protein perkapita)	Persen	100	100
27.	Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal	73) Jumlah regulasi ketahanan pangan	Produk	1	2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
28.	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	74) Luas lahan bersertifikat	Bidang/ Sertifikat	90 Bidang	500 Bidang
		75) Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Persen		100
29.	Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara, dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air	76) Persentase pencemaran status mutu air	Persen	100	100
		77) Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Persen	46	52
		78) Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air	Persen	88	100
		79) Cakupan pengawasan terhadap UKL dan UPL	Persen	85	90
		80) Persentase luas lahan terbuka hijau wilayah perkotaan	Persen	40	45
		81) Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi bio massa	Persen	60	75
		82) Persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3 R	Persen	8	9
		83) Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB	Persen	0,33	0,37
		84) Cakupan pengawasan terhadap amdal	Persen	85	90
		85) Persentase penegakan hukum lingkungan	Persen	100	100
30.	Terwujudnya Watampone sebagai Kota Adipura (Ibu Kota Watampone)	86) Penilaian Kementerian Lingkungan Hidup	Nilai	Piagam Adipura	Piala Adipura
31.	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan	87) Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau wilayah Perkotaan (Ha)	Persen	40,00	45,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
32.	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan berkondisi baik	88) Persentase kemantapan jalan kabupaten	Persen	73,33	57,35
33.	Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi	89) Tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi	Ha	23,79	24.395 Ha
34.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem jaringan transportasi	90) Tingkat kecukupan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan	Persen	100	100
35.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	91) Persentase Rumah Layak Huni	Persen	38	100
36.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan keluarga memiliki sarana air bersih dan sanitasi	92) Persentase penurunan Kawasan Kumuh	Persen	35	32
		93) Jumlah rumah tidak layak huni	Persen	32	35
		94) Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	Persen	90	100
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan					
37.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil	95) Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	100	100
		96) Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	100	100
38.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	97) Persentase PMKS yang tertangani	Persen	18,52	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
39.	Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa	98) Persentase jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang dibina	Persen	100	100
40.	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	99) IPG	Indeks	66,36	67,28
		100) IDG	Indeks	80,47	83,11
41.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan	101) Rasio KDRT	Persen		30
		102) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen		
42.	Meningkatnya rasa aman dan nyaman transmigran di Lokasi Pemukiman Transmigrasi	103) Transmigran swakarsa	Persen	100	100
Misi 5 : Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat					
43.	Meningkatnya penyelenggaraan even-even seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah	104) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg.	6	6
Misi 6 : Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN					
44.	Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum & kesadaran bela negara	105) Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu	Persen	90	92

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
45.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat (menurunnya gangguan Kantibmas)	106) Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat (jumlah gangguan Kantibmas)	Persen	100	100
46.	Meningkatnya pendapatan asli daerah dan meningkatnya status audit keuangan daerah oleh BPK	107) Jumlah capaian pajak daerah	Rupiah	35.410.41 9.377	35.622.88 1.894
		108) Jumlah capaian retribusi daerah	Rupiah	15.3434.2 79.653	15.466.02 5.890
		109) Perbaikan sarana dan prasarana penghasil retribusi	unit	15	16
		110) Opini BPK terhadap audit keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP
47.	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya	111) Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Persen	100	100
48.	Terjalannya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalannya kerjasama antar pemerintah daerah	112) Persentase peningkatan jumlah Perda yang ditetapkan setiap tahun	Persen	100	100
49.	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku	113) Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh SKPD	Persen	100	100
50.	Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan	114) Persentase ketersediaan website milik Pemda	Persen	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja akhir RPJMD (2018)
51.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	115) Kategori Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kategori	Baik	Baik
52.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaan-perencanaan normatif lainnya sesuai kebutuhan	116) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan	Persen	100	100
53.	Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang valid dan <i>up to date</i> sesuai kebutuhan	117) Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis sistem informasi manajemen	Persen	100	100

Watampone, 20 Maret 2017

BUPATI BONE

H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

**PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN SKPD
TAHUN 2017**

No.	Program	Anggaran	Ket.
1	Sekretariat DPRD		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.507.829.500	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.765.700.000	
	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 39.095.500	
	- Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 13.058.175.000	
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 627.200.000	
	Sekretariat Daerah	Rp. 21.839.270.005	
1	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 109.826.000	
	- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp. 82.974.000	
	- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp. 126.000.000	
	- Penataan Daerah Otonom Baru	Rp. 40.000.000	
	- Penataan Daerah Otonom Baru	Rp. 35.000.000	
	- Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	Rp. 101.500.000	
	- Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah	Rp. 22.200.000	
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	- Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Rp. 837.205.000	
	- Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Rp. 559.635.000	
	- Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	Rp. 101.500.002	
	- Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	Rp. 101.500.003	
3	Bagian Hukum		
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 218.200.000	
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 146.525.000	
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 177.175.000	
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 55.100.000	
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 223.000.000	

4	Bagian Kerjasama		
	- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp.	79.500.000
	- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp.	100.500.000
	- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp.	65.000.000
5	Bagian Ekonomi		
	- Pengembangan Data/Informasi	Rp.	100.990.000
	- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	550.000.000
	- Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	67.850.000
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	217.200.000
	- Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	71.730.000
	- Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	80.000.000
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	150.000.000
	- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	253.150.000
6	Bagian Pembangunan Infrastruktur		
	- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.	183.000.000
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	50.000.000
	- Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	96.500.000
	- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.	100.000.000
7	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Pengembangan Data Informasi	Rp.	348.000.000
	- Pengembangan Data Informasi	Rp.	127.000.000
	- Pengembangan Data Informasi	Rp.	150.000.000
8	Bagian Administrasi SDA		
	- Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Rp.	139.466.000
	- Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Rp.	97.305.000
	- Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Rp.	135.229.000
9	Bagian Organisasi		
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	92.690.000
	- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp.	145.000.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	100.072.000
	- Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.	160.938.000
	- Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	42.235.000
	- Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.	135.065.000

10	Bagian Umum		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	339.800.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	177.700.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	185.000.000
	- Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	2.456.000.000
11	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	50.000.000
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	200.010.000
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	250.000.000
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	700.000.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	313.500.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	646.500.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	528.500.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	464.500.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	350.000.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	100.000.000
12	Bagian Humas dan Protokol		
	- Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	4.951.000.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.412.500.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp.	125.000.000
	- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	843.500.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	50.000.000
	- Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	200.000.000
	- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	720.000.000
1	Inspektorat		
	- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	1.781.425.000
	- Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp.	10.290.000
	- Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	208.650.000
	- Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp.	171.100.000

	- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp.	43.500.000	
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	33.850.000	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	297.942.000	
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	453.261.000	
Dinas Daerah				
1	Dinas Pendidikan			
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.497.116.000	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	450.300.000	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	95.000.000	
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	64.800.000	
	- Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	1.800.811.000	
	- Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.	52.203.163.000	
	- Pendidikan Menengah	Rp.	285.150.000	
	- Pendidikan Non Formal	Rp.	653.848.000	
	- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	3.216.834.500	
	- Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	248.842.000	
2	Dinas Kesehatan			
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.148.135.000	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	9.470.840.000	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	97.390.000	
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	26.864.100	
	- Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	9.071.500.000	
	- Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	3.056.033.000	
	- Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	100.000.000	
	- Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	14.750.000	
	- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	21.760.000	
	- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	21.977.662.000	
	- Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	18.625.000	
	- Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp.	64.000.000	
	- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp.	215.288.900	

	-	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.688.920.000	
	-	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp.	28.190.000	
	-	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/PUSTU dan Jaringannya	Rp.	3.436.005.000	
	-	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Rp.	4.000.000.000	
	-	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp.	94.952.434.000	
	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp.	20.060.000	
	-	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Rp.	13.750.000	
	-	Peningkatan Keselamatan Ibu	Rp.	1.629.303.000	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.530.900.000	
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	449.450.000	
	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	90.000.000	
	-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	26.820.000	
	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	41.920.205.000	
	-	Bulan Bakti TNI	Rp.	750.000.000	
	-	Perencanaan Tata Ruang	Rp.	904.410.000	
	-	Pengembangan Data/Informasi	Rp.	217.680.000	
	-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	108.000.000	
	-	Pemanfaatan Ruang	Rp.	29.600.000	
	-	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp.	63.000.000	
	-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan	Rp.	63.795.132.500	
	-	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp.	165.000.000	
	-	Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Rp.	400.000.000	
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp.	267.545.000	
	-	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp.	18.264.822.500	
	-	Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp.	123.880.000	
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air				
	-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Rp.	5.418.100.000	
	-	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Rp.	857.179.000	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah	Rp.	200.000.000	

6	Dinas Pemadam Kebakaran		
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	187.625.000
	- Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	25.000.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	396.352.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	231.680.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp.	17.168.000
	- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp.	3.092.700.000
	- Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp.	2.171.100.000
8	Dinas Sosial		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	506.360.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	255.660.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	42.355.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	130.500.000
	- Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp.	380.000.000
	- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	130.000.000
	- Pembinaan Anak Terlantar	Rp.	60.000.000
	- Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp.	60.000.000
	- Pemeliharaan Areal Pemakaman	Rp.	80.000.000
	- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	105.125.000
9	Dinas Ketenagakerjaan		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	561.523.800
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	114.100.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	33.125.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	21.135.000
	- Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp.	1.874.159.700
	- Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	275.114.500
	- Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	119.942.000

10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	561.523.800
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	114.100.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	33.125.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	21.135.000
11	Dinas Ketahanan Pangan		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	438.440.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	71.375.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	3.650.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	5.000.000
	- Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perkebunan	Rp.	917.185.000
12	Dinas Lingkungan Hidup		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	732.510.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	948.380.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	94.710.000
	- Pengembangan Data/Informasi	Rp.	60.000.000
	- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	4.119.840.000
	- Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.244.867.000
	- Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp.	750.000.000
	- Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp.	400.000.000
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	150.000.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	832.380.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	606.520.100
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	10.000.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	8.100.000
	- Pengembangan Data/Informasi	Rp.	23.400.000
	- Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	2.184.196.900
	- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	27.000.000

14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	832.380.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	606.520.100
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	568.800.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	709.288.000
	- Program Disiplin Aparatur	Rp.	64.800.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	75.000.000
	- Pengembangan Data/Informasi	Rp.	158.000.000
	- Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	42.998.000
	- Program Keluarga Berencana	Rp.	2.984.760.000
	- Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp.	311.760.000
	- Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp.	141.421.000
	- Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp.	521.580.000
	- Program Informasi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Rp.	370.000.000
	- Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp.	107.500.000
	- Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp.	35.100.000
	- Pengembangan Modal Operasional BKB, Posyandu, Padu	Rp.	170.890.000
16	Dinas Perhubungan		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	415.315.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	161.000.000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	42.125.000
	- Pengembangan Data/Informasi	Rp.	15.000.000
	- Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	514.182.000
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp.	93.350.000
	- Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	295.200.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp.	113.828.000
	- Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	150.000.000

17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	746.814.200
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.531.805.000
-	Peningkatan Kegiatan Sumber Daya Aparatur	Rp.	104.500.000
-	Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah	Rp.	243.500.000
-	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	913.904.200
-	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp.	1.464.075.800
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	359.979.300
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	251.136.300
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	53.000.000
-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	48.300.000
-	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp.	304.860.000
-	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	947.624.400
-	Fasilitas Pengembangan Indikator Teknologi dan Bisnis	Rp.	35.100.000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	684.961.300
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	430.150.000
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	167.153.500
-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	23.320.000
-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	365.550.000
-	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp.	359.024.000
-	Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Rp.	150.000.000
-	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	490.744.600
-	Pengembangan Kemitraan	Rp.	48.299.000
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp.	229.085.100
-	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp.	51.712.500

20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	556.847.000
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	60.806.000
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	44.250.000
-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp.	16.959.000
21	Dinas Kebudayaan		
-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	433.300.000
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	836.700.000
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	50.000.000
-	Pengembangan Nilai Budaya	Rp.	650.000.000
-	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp.	500.000.000
-	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	880.000.000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	532.894.000
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	467.085.000
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	31.000.000
-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	5.250.000
-	Pengembangan Data/Informasi	Rp.	34.950.000
-	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	58.997.500
-	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Rp.	38.070.000
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rp.	22.485.000
-	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	553.939.000
-	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	5.329.500
23	Dinas Kelautan dan Perikanan		
-	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	1.625.500.000
-	Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.	3.057.500.000
-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp.	137.000.000
-	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Rp.	758.800.000

24	Dinas Pariwisata		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	184.000.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	77.825.000
	- Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	50.000.000
	- Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.	355.000.000
	- Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan)	Rp.	4.820.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp.	1.053.175.000
	- Pengembangan Kemitraan	Rp.	200.000.000
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	967.847.900
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	732.580.000
	- Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	60.000.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	63.800.000
	- Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	1.508.646.000
	- Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rp.	6.716.860.000
	- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Rp.	507.112.000
	- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Rp.	5.682.485.000
	- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	119.565.000
	- Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp.	22.882.571.100
	- Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	121.600.000
	- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp.	843.040.000
	- Standarisasi Kualitas Bahan Baku	Rp.	305.000.000
	- Peningkatan Produksi, Produktifitas Mutu Hasil Perkebunan Berkelanjutan	Rp.	454.050.000
26	Dinas Peternakan		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	638.435.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	650.375.000

	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	70.000.000	
	-	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	810.900.000	
	-	Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis	Rp.	767.700.000	
	-	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	190.000.000	
	-	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp.	365.810.000	
	-	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp.	2.905.480.000	
	-	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp.	419.000.000	
	-	Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Rp.	255.800.000	
27	Dinas Perdagangan				
	-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	486.045.000	
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	172.600.000	
	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	95.000.000	
	-	Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	Rp.	30.000.000	
	-	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	105.650.000	
	-	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp.	143.035.000	
	-	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	4.323.410.000	
	-	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp.	10.880.000	
28	Dinas Perindustrian				
	-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	486.045.000	
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	172.600.000	
	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	95.000.000	
	-	Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	Rp.	30.000.000	
	-	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	105.650.000	
Badan Daerah					
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	486.045.000	
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	172.600.000	
	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	95.000.000	
	-	Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	Rp.	30.000.000	
	-	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	105.650.000	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	-	Program Administrasi Perkantoran	Rp.	25.098.001.250	

	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.366.600.000	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	344.750.000	
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	450.665.000	
	- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	276.610.000	
	- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	75.000.000	
	- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.	238.073.000	
	- Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	5.456.800.750	
	- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	182.500.000	
3	Badan Pendapatan Daerah			
	- Penyediaan Administrasi Perkantoran	Rp.	9.924.658.000	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp.	773.050.000	
	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	50.000.000	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	275.000.000	
	- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	3.903.604.000	
	- Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	1.053.214.000	
	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	120.474.000	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	635.622.200	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	310.900.000	
	- Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	11.100.000	
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	43.258.700	
	- Pengembangan Data/Informasi	Rp.	254.043.700	
	- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	37.800.000	
	- Pendidikan Kedinasan	Rp.	178.149.000	
	- Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.	2.769.126.400	

5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	635.622.200
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	310.900.000
	- Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	11.100.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	43.258.700
	- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	254.043.700
	- Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Rp.	254.043.701
	- Optimalisasi Izin Penelitian	Rp.	254.043.702
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	161.729.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	101.490.625
	- Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	41.120.000
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	12.587.500
	- Pengembangan Data/Informasi	Rp.	14.200.000
	- Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp.	120.775.000
	- Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Rp.	120.700.000
	- Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Rp.	44.634.700
	- Peningkatan Peran serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Rp.	20.700.000
	- Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp.	38.704.200

Watampone, 20 Maret 2017

BUPATI BONE

H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.